



SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

PENGUATAN KELEMBAGAAN PUSAT DAN DAERAH

**DEPUTI SESWAPRES BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN PENANGGULANGAN
KEMISKINAN SELAKU SEKRETARIS EKSEKUTIF TNP2K**

Jakarta, Mei 2011

PENCAPAIAN SASARAN TINGKAT KEMISKINAN



● Tingkat Kemiskinan

■ Target RPJM (Skenario Optimis)

▲ Target RPJM (Skenario Moderat)

PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Maret 2009 – Maret 2010 : 14,7 juta penduduk keluar dari kemiskinan; 13.2 juta penduduk masuk kembali ke bawah garis kemiskinan → Net 1,5 juta penduduk keluar dari kemiskinan

I. MENYEMPURNAKAN PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL

- Bantuan Sosial Berbasis Keluarga
- Bantuan Kesehatan bagi Keluarga Miskin
- Bantuan Pendidikan bagi Masyarakat Miskin

II. MENINGKATKAN AKSES RUMAH TANGGA MISKIN TERHADAP PELAYANAN DASAR: PENDIDIKAN, KESEHATAN, PELAYANAN DASAR SEPERTI SANITASI DAN AIR BERSIH

III. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

- Menyempurnakan pelaksanaan PNPM Mandiri

IV. PERTUMBUHAN EKONOMI BERKUALITAS: “INCLUSIVE GROWTH”

- UMKM (KUR dan Bantuan kepada Usaha Mikro)
- Industri Manufaktur Padat Pekerja
- Konektivitas Ekonomi (Infrastruktur)
- Iklim Usaha (Pasar Kerja yang Luwes dan Infrastruktur)
- Pembangunan Perdesaan
- Pembangunan Pertanian

INSTRUMEN UTAMA PENANGGULANGAN KEMISKINAN

1. Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Individu atau Rumah Tangga (Klaster I)
2. Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Komunitas (Klaster II)
3. Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Usaha Mikro dan Kecil (Klaster III)

PRIORITAS JANGKA PENDEK - MENENGAH

1. Unifikasi Sistem Penargetan Nasional
2. Menyempurnakan Pelaksanaan Bantuan Sosial Kesehatan untuk Keluarga Miskin
3. Menyempurnakan Pelaksanaan dan Memperluas Cakupan Program Keluarga Harapan
4. Integrasi Program Pemberdayaan Masyarakat Lainnya ke dalam PNPM

Dimonitor Melalui Inpres No. 1/2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010 ; dan Inpres No. 3/2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan

DASAR HUKUM TKPK DAERAH

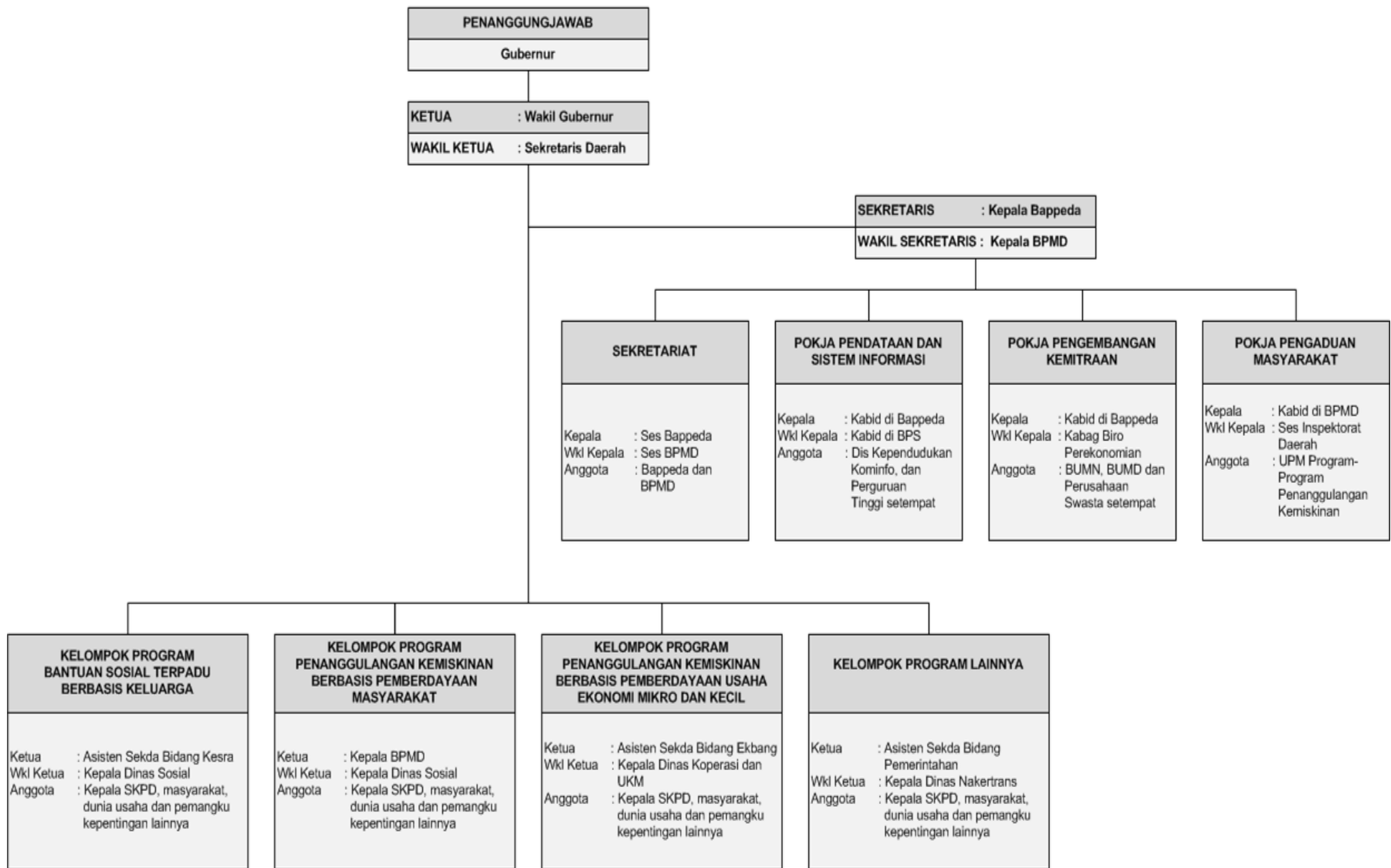
- Perpres No. 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- Permendagri No. 42 tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota

KELEMBAGAAN TKPK PROVINSI

Berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

- **Ketua** : Wakil Gubernur (ditetapkan oleh Gubernur)
- **Sekretaris** : Kepala Bappeda Provinsi (ditetapkan oleh Gubernur)
- **Anggota** : Unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan.
- Penetapan tugas, susunan keanggotaan, kelompok kerja, sekretariat, dan pendanaan diatur dengan SK Gubernur, dengan memperhatikan Perpres No. 15 tahun 2010.

STRUKTUR ORGANISASI TKPK PROVINSI

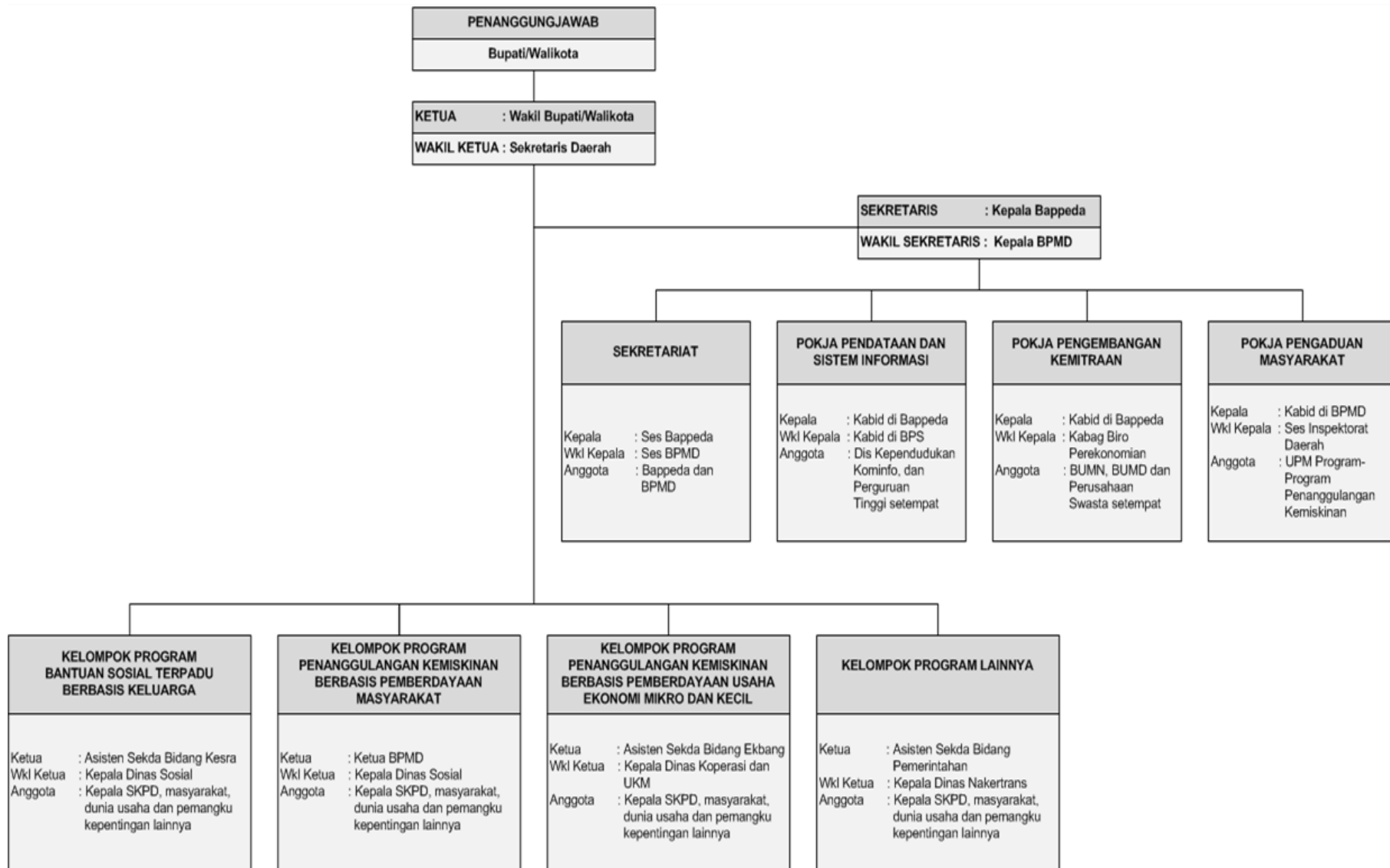


KELEMBAGAAN TKPK KABUPATEN/KOTA

Berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.

- **Ketua** : Wakil Bupati/Wakil Walikota (ditetapkan oleh Bupati/Walikota)
- **Sekretaris** : Kepala Bappeda Kabupaten/Kota (ditetapkan oleh Bupati/Walikota)
- **Anggota** : terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan.
- Penetapan tugas, susunan keanggotaan, kelompok kerja, sekretariat, dan pendanaan TKPK Kabupaten/Kota diatur dengan SK Bupati/Walikota dengan memperhatikan Perpres No. 15 tahun 2010.

STRUKTUR ORGANISASI TKPK KABUPATEN/KOTA



HARAPAN KEPADA TKPK DAERAH

1. TKPKD mampu mendorong **proses perencanaan dan penganggaran** yang dapat mendukung efektivitas penanggulangan kemiskinan.
2. TKPKD mampu melakukan **koordinasi dan pemantauan** program penanggulangan kemiskinan di daerah.
3. TKPKD menyampaikan laporan **hasil rapat koordinasi** TKPKD, paling sedikit 3 kali setahun (Pasal 25 Permendagri No. 42 tahun 2010); dan **hasil pelaksanaan penanggulangan kemiskinan** di daerah kepada Wakil Presiden selaku Ketua TNP2K (Pasal 27 Permendagri No. 42 tahun 2010)

TUGAS TIM TEKNIS TKPK DAERAH

Menyiapkan Agenda Rapat TKPK Daerah, yakni:

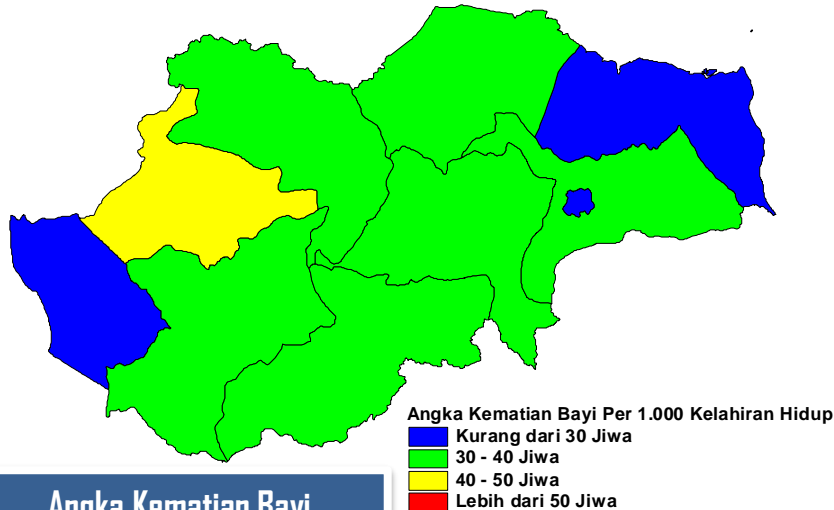
1. Hasil analisis terhadap **kondisi kemiskinan** di daerah
2. Hasil analisis terhadap **anggaran belanja** untuk penanggulangan kemiskinan di daerah (APBN dan APBD)
3. Skema **koordinasi** dan **pengendalian** pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di daerah

ANALISIS KONDISI KEMISKINAN DAERAH

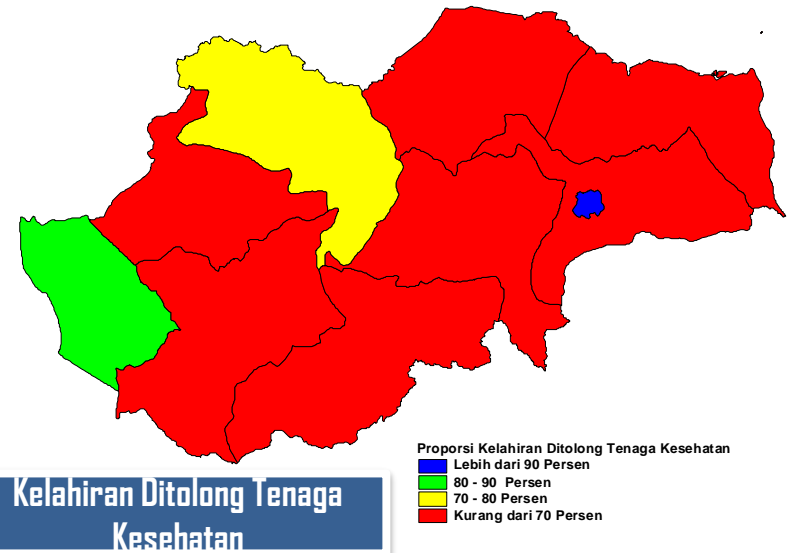
PENENTUAN INDIKATOR

| Bidang | Indikator Utama yang Disarankan |
|---------------------------------------|--|
| Kemiskinan dan Ketenagakerjaan | Tingkat Kemiskinan Tingkat Pengangguran |
| Kesehatan | Angka Kematian Bayi Angka Kematian Balita Angka Kematian Ibu Melahirkan Prevalensi Balita Kekurangan Gizi |
| Pendidikan | Angka Partisipasi Kasar Angka Partisipasi Murni Angka Melek Huruf Angka Putus Sekolah |
| Infrastruktur Dasar | Akses Sanitasi Layak Akses Air Minum Layak Rasio Elektrifikasi |
| Ketahanan Pangan | Perkembangan Harga Beras Perkembangan Harga Bahan Kebutuhan Pokok Utama |

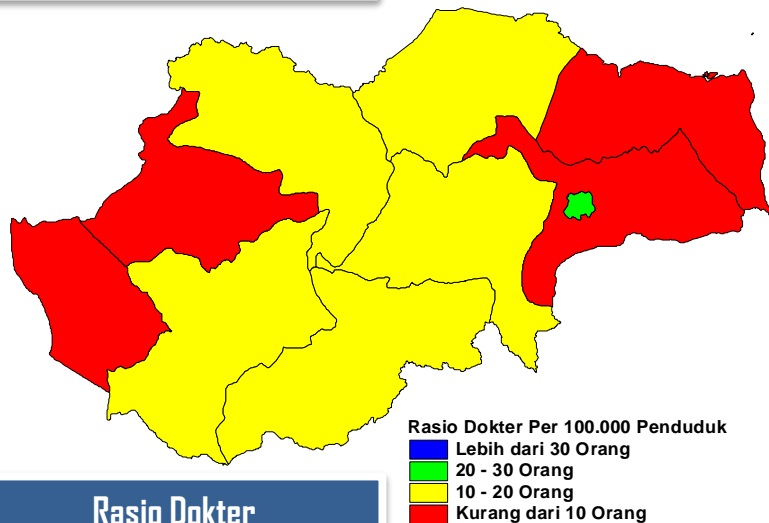
ANGKA KEMATIAN BAYI DAN INDIKATOR PENDUKUNGNYA DI PROVINSI JAMBI



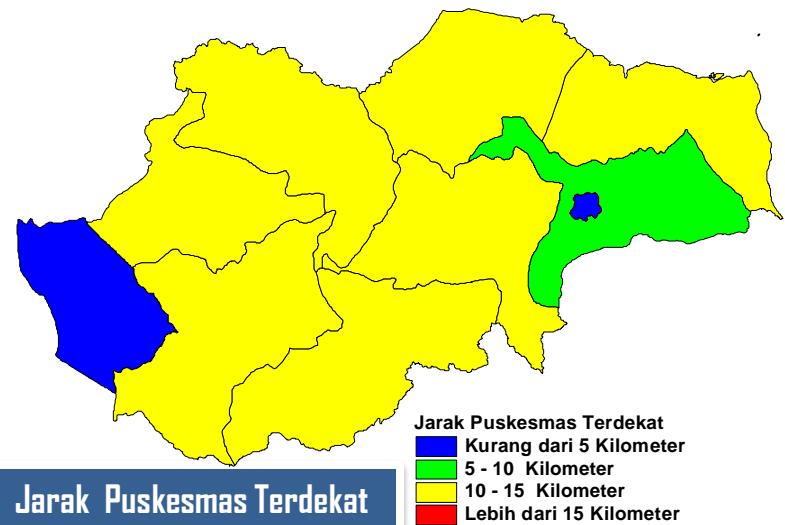
Angka Kematian Bayi



Kelahiran Ditolong Tenaga Kesehatan



Rasio Dokter

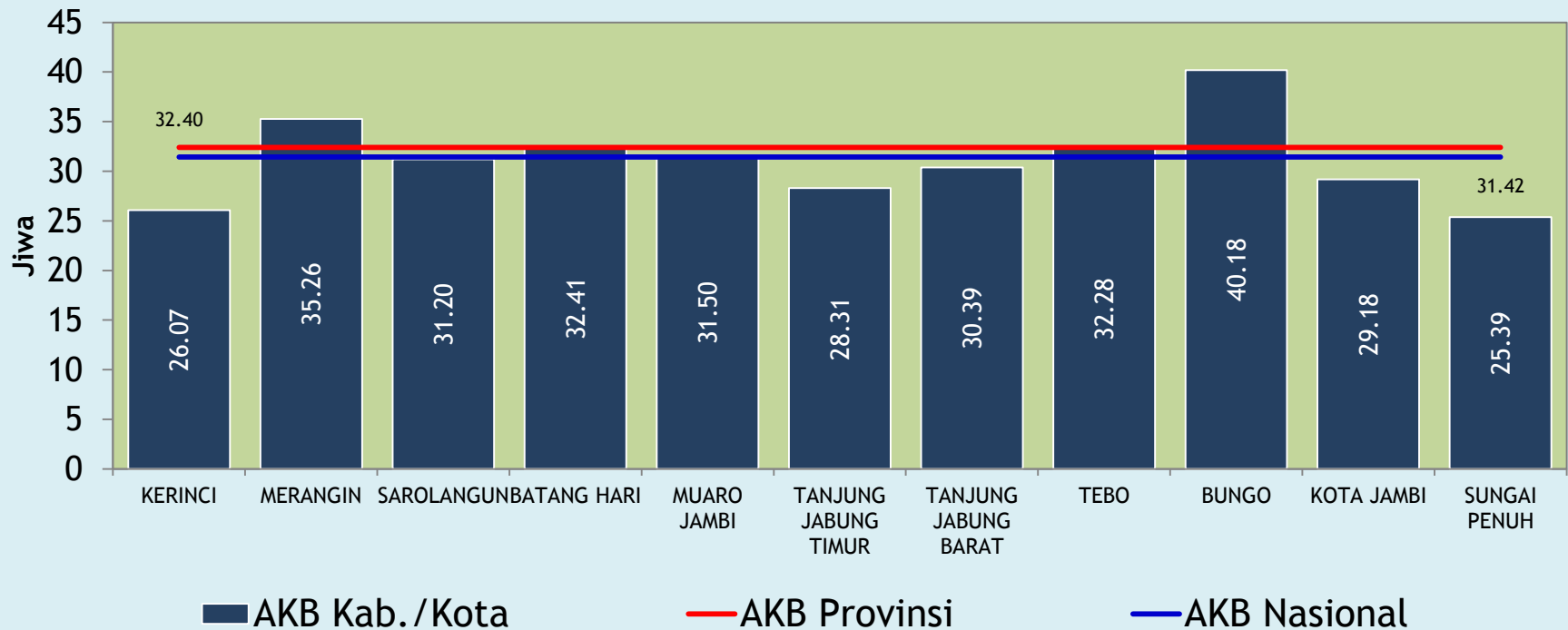


Jarak Puskesmas Terdekat

ANALISIS PERBANDINGAN ANTAR WILAYAH

Contoh Kasus

Perbandingan Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1.000 Kelahiran Hidup Menurut Kabupaten/Kota, Provinsi Jambi Tahun 2009

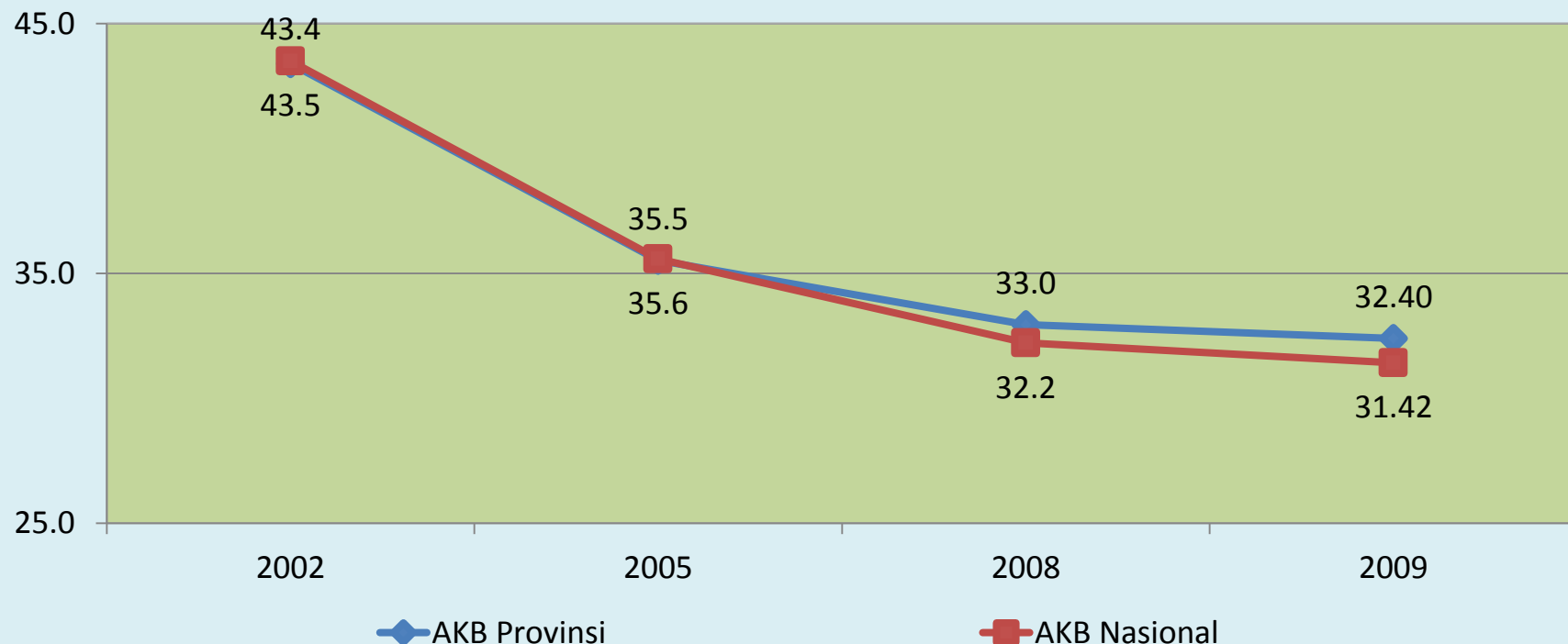


Masih terdapat kesenjangan (disparitas) angka kematian bayi (AKB) antar wilayah di Provinsi Jambi. Beberapa wilayah, perlu memperoleh perhatian dan intervensi untuk menurunkan angka kematian bayi (AKB). Wilayah-wilayah tersebut di antaranya: Kabupaten Merangin; Batang Hari, Tebo dan Bungo.

ANALISIS RELEVANSI

Contoh Kasus

Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) Provinsi Jambi, Tahun 2002 - 2009

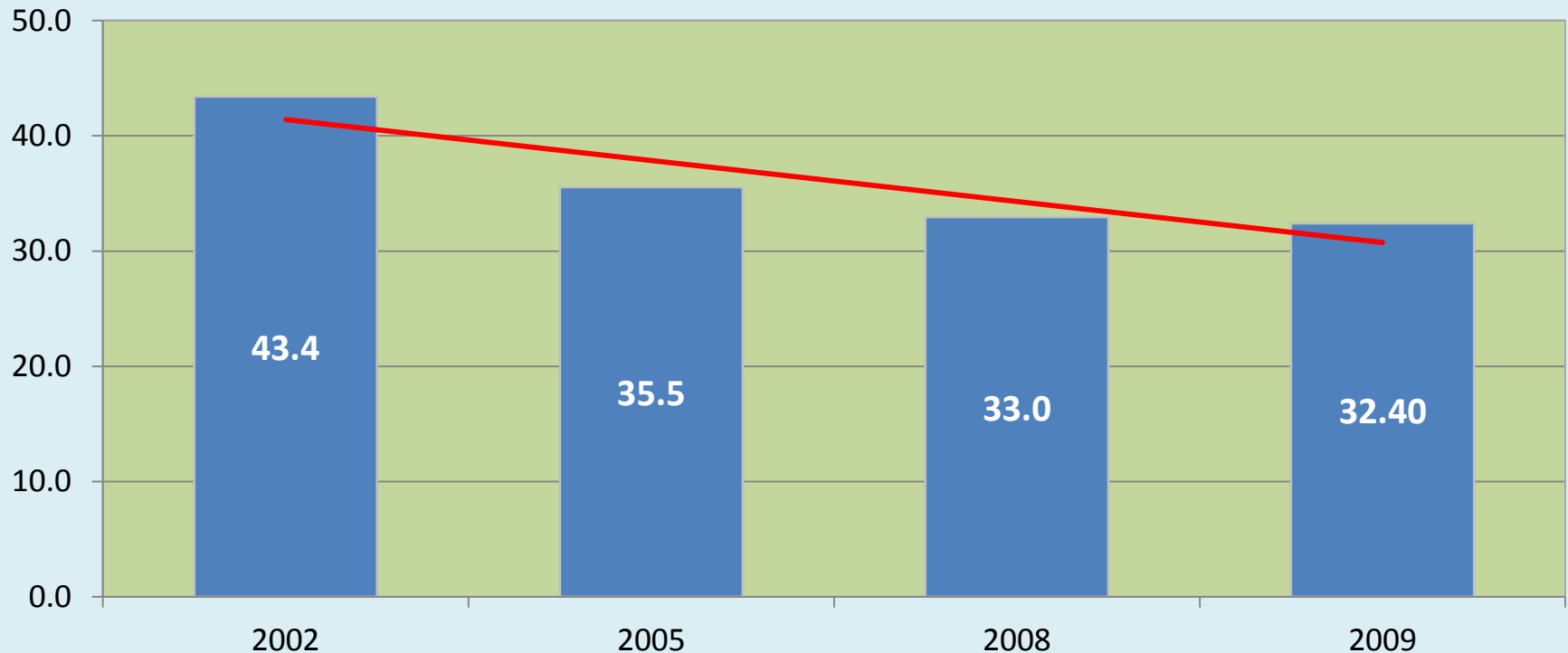


Pada tahun 2002 – 2009, kecenderungan angka kematian bayi (AKB) di Provinsi Jambi sejalan dengan kecenderungan angka kematian bayi (AKB) tingkat nasional. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada periode tersebut upaya penurunan angka kematian bayi di Provinsi Jambi sejalan untuk mendukung tujuan nasional.

ANALISIS EFEKTIVITAS

Contoh Kasus

Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) Provinsi Jambi, Tahun 2002-2009

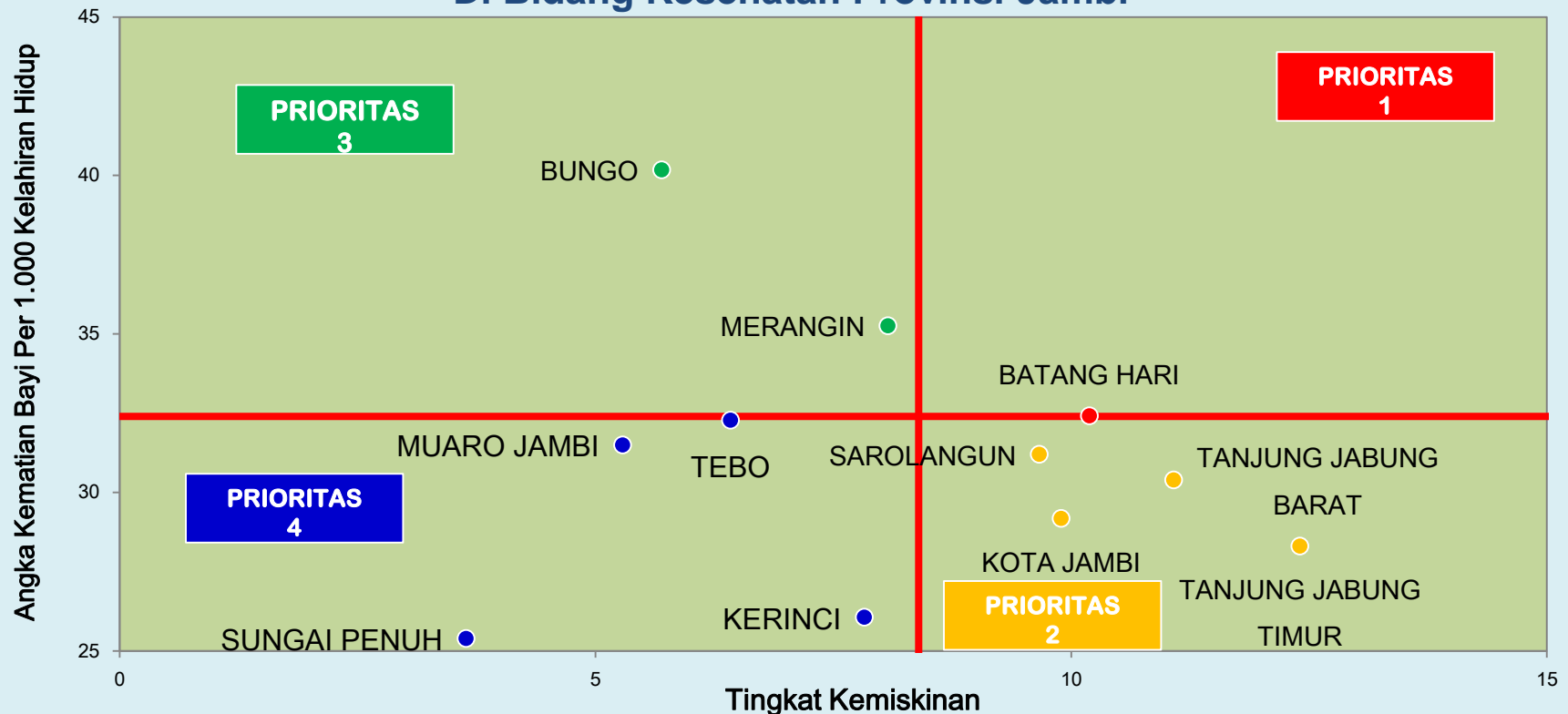


Pada periode tahun 2002-2009, AKB Provinsi Jambi menurun dari 43,4 jiwa/1000 kelahiran hidup menjadi 32,43 jiwa/1000 kelahiran hidup. Dengan demikian, program-program yang mendukung penurunan angka kematian bayi (AKB) di Provinsi Jambi efektif dan berdampak positif terhadap kualitas kesehatan penduduk, khususnya kesehatan bayi.

ANALISIS PENENTUAN WILAYAH PRIORITAS

Contoh Kasus

Penentuan Kabupaten/kota Prioritas Untuk Dilakukan Intervensi Di Bidang Kesehatan Provinsi Jambi



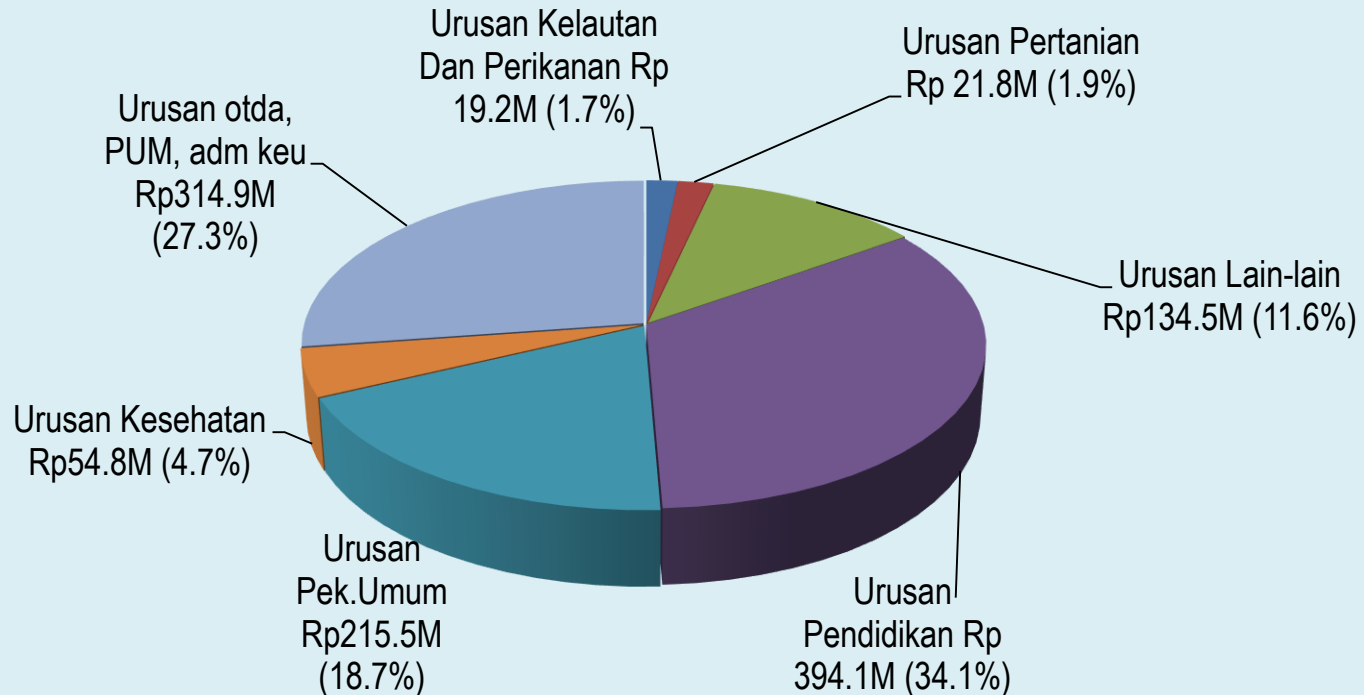
Dengan menggunakan tingkat kemiskinan sebagai target intervensi dan angka kematian bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup sebagai salah satu indikator utama dibidang kesehatan dapat ditentukan wilayah-wilayah yang perlu memperoleh prioritas intervensi. **Prioritas pertama** adalah wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan AKB tinggi, wilayah tersebut adalah: Kabupaten Batang Hari.

ANALISIS BESARAN PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH

ANALISIS ANGGARAN MELIHAT KESESUAIAN ALOKASI DENGAN PRIORITAS

Contoh Kasus

Distribusi Belanja Sektor Terhadap Total Anggaran Kota Surakarta

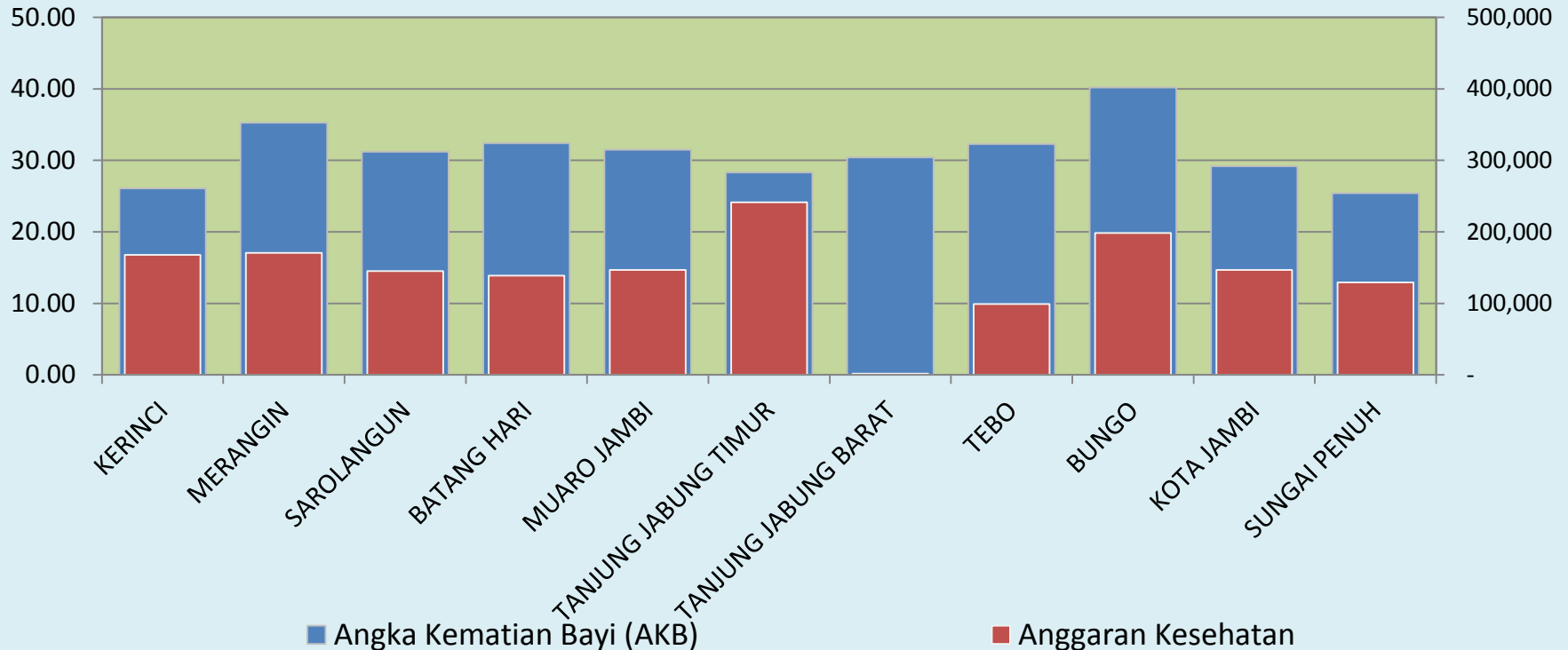


Alokasi anggaran sektor pendidikan paling besar dibandingkan dengan anggaran untuk urusan lainnya. Anggaran yang dialokasikan untuk sektor pendidikan sebesar Rp 394,1 miliar, setara 34.1 persen APBD. Alokasi anggaran tersebut mencerminkan alokasi yang efektif bagi penanggulangan kemiskinan apabila sektor pendidikan merupakan prioritas di Surakarta.

ANALISIS ANGGARAN OLEH PEMERINTAH DAERAH SATU TINGKAT DI ATASNYA UNTUK MELIHAT DISTRIBUSI ANGGARAN

Contoh Kasus

Distribusi Anggaran Bidang Kesehatan dan Permasalahan Angka Kematian Bayi Provinsi Jambi, Tahun 2010



Pengalokasian anggaran tahun 2010 belum sepenuhnya sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Sebagai contoh: Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tebo merupakan daerah dengan AKB relatif tinggi namun anggaran bidang kesehatan lebih rendah dibandingkan dengan anggaran kesehatan untuk daerah-daerah yang memiliki AKB tinggi lainnya.

CONTOH KASUS ANALISIS DISTRIBUSI ANGGARAN: BIDANG KESEHATAN

Contoh Kasus

Belanja Kesehatan Menurut Jenis Program Kabupaten Ende, Tahun 2009

| PROGRAM | TOTAL (RP) | PERSEN |
|--|-----------------------|---------------|
| Program Kesehatan Masyarakat | 14,997,017,108 | 21.15% |
| PR 1.1 KIA | 1,789,936,829 | 2.52% |
| PR 1.2 Gizi | 529,165,600 | 0.75% |
| PR 1.3 Immunisasi | 250,209,538 | 0.35% |
| PR 1.5 Malaria | 7,147,062 | 0.01% |
| PR 1.6 HIV/AIDS | 107,281,285 | 0.15% |
| PR 1.7 Penyakit Menular Lain | 532,680,000 | 0.75% |
| PR 1.9 KB | 248,927,050 | 0.35% |
| PR 1.10 Usaha Kesehatan Sekolah | 38,465,000 | 0.05% |
| PR 1.12 Kesehatan Lingkungan | 10,649,674,005 | 15.02% |
| PR 1.13 Promosi Kesehatan | 769,817,416 | 1.09% |
| PR 1.14 Penanggulangan Bencana | 28,219,238 | 0.04% |
| PR 1.15 Surveilans | 42,994,085 | 0.06% |
| PR 1.16 Program Kesehatan Masyarakat Lainnya | 2,500,000 | 0.00% |

| PROGRAM | TOTAL (RP) | PERSEN |
|--|-----------------------|----------------|
| Program Kesehatan Perorangan | 25,069,669,749 | 35.35% |
| PR 2.1 Pelayanan Rajal | 927,859,101 | 1.31% |
| PR 2.2 Pelayanan Ranap | 2,159,795,759 | 3.05% |
| PR 2.3 Pelayanan Rujukan | 4,444,890,100 | 6.27% |
| PR 2.4 Pengobatan Umum (tidak jelas masuk PR 2.1- 2.3) | 17,537,124,790 | 24.73% |
| Program yang Menyangkut Capacity Building/Penunjang | 30,855,527,371 | 43.51% |
| PR 3.1 Administrasi & Manajemen | 15,854,286,995 | 22.35% |
| PR 3.3 Capacity Building | 1,401,968,343 | 1.98% |
| PR 3.4 Pengadaan dan Pemeliharaan Infrastruktur | 8,486,541,583 | 11.97% |
| PR 3.5 Pengawasan (Monitoring dan Supervisi) | 81,240,000 | 0.11% |
| PR 3.6 Obat dan Perbekalan Kesehatan | 5,014,666,210 | 7.07% |
| PR 3.8 Program Capacity Building/Penunjang Lainnya | 16,824,240 | 0.02% |
| Grand Total | 70,922,214,228 | 100.00% |

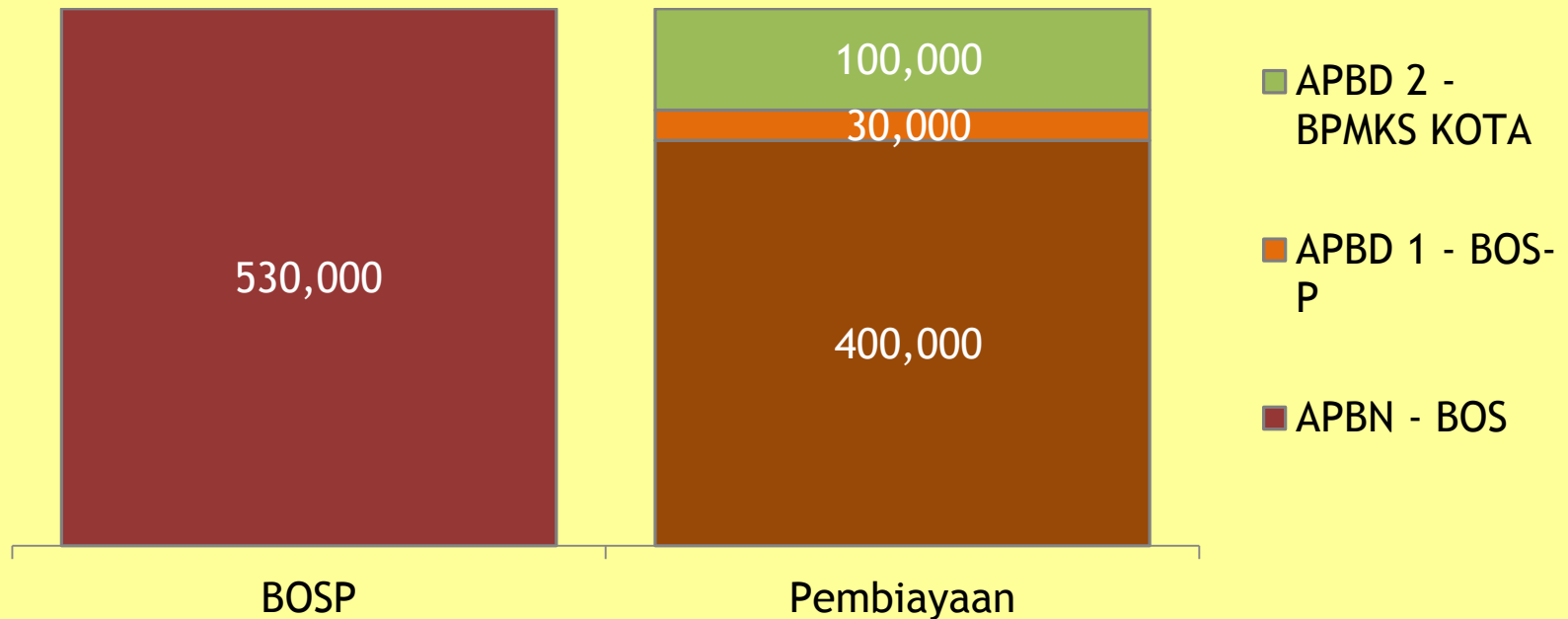
Sumber: Ascobat Gani, 2010

Distribusi anggaran program kesehatan masyarakat lebih kecil dibandingkan dengan anggaran program penunjang dan program kesehatan perorangan. Dari keseluruhan anggaran sektor kesehatan, hanya 21,15 persen yang digunakan untuk program kesehatan masyarakat. Anggaran program kesehatan masyarakat yang relatif lebih kecil berpotensi memperlambat pencapaian sasaran pembangunan dan sasaran pencapaian MDGs, khususnya pada bidang kesehatan.

CONTOH KASUS ANALISIS GAP: BIDANG PENDIDIKAN

Contoh Kasus

Kebutuhan dan Pemenuhan Biaya Operasional Satuan pendidikan - Jenjang Sekolah Dasar (SD/MI) Kota Surakarta

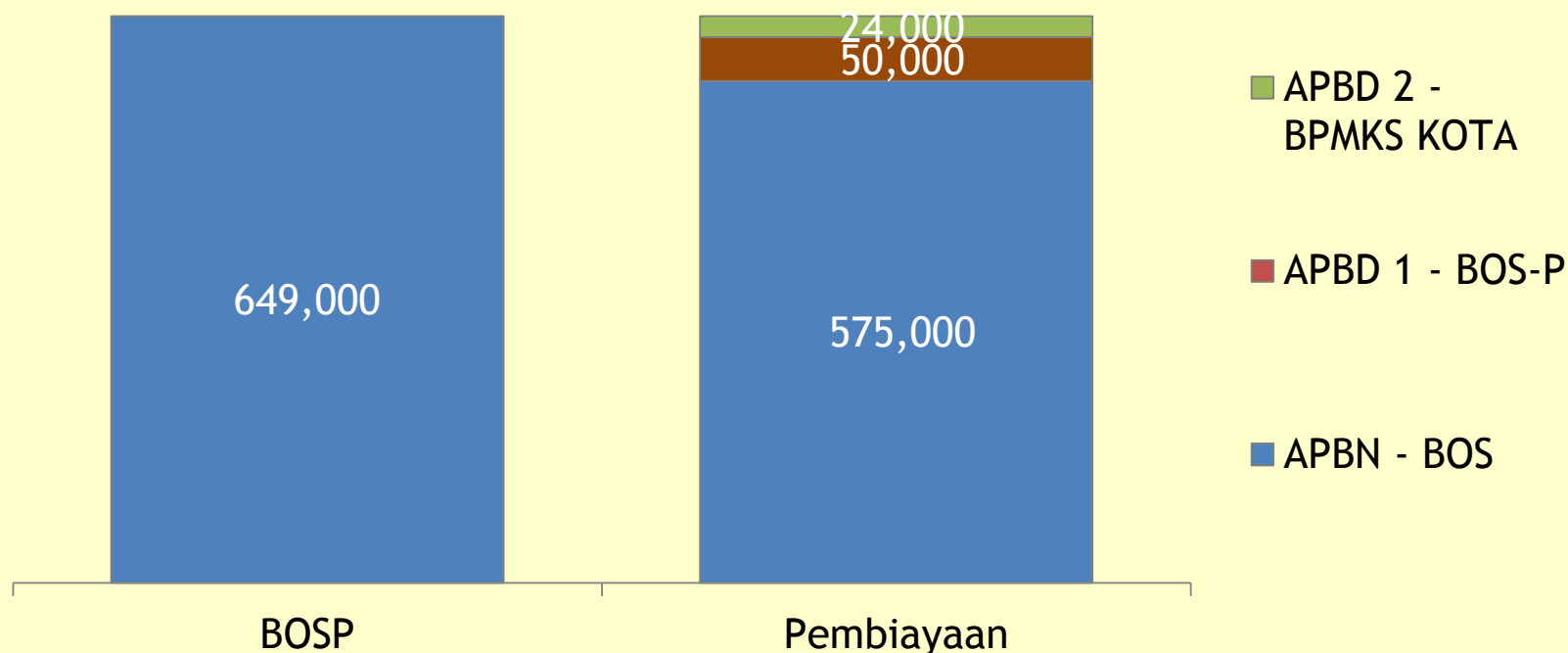


Sumber: Hasil Perhitungan Biaya Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Kota Surakarta, 2010

Hasil perhitungan BOSP untuk SD/MI dengan menggunakan indeks Permendiknas adalah sebesar Rp 530,000 per siswa. Pemerintah pusat melalui alokasi BOS menyediakan sebesar Rp 400.000 per siswa. Sisanya sebesar Rp. 130,000 per siswa harus disediakan oleh pemerintah daerah. Jika Pemerintah Provinsi mengalokasikan Rp. 30.000 per siswa, maka pemerintah kota harus menyediakan Rp. 100,000 per siswa.

Contoh Kasus

Kebutuhan dan Pemenuhan Biaya Operasional Satuan pendidikan - Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs) Kota Surakarta



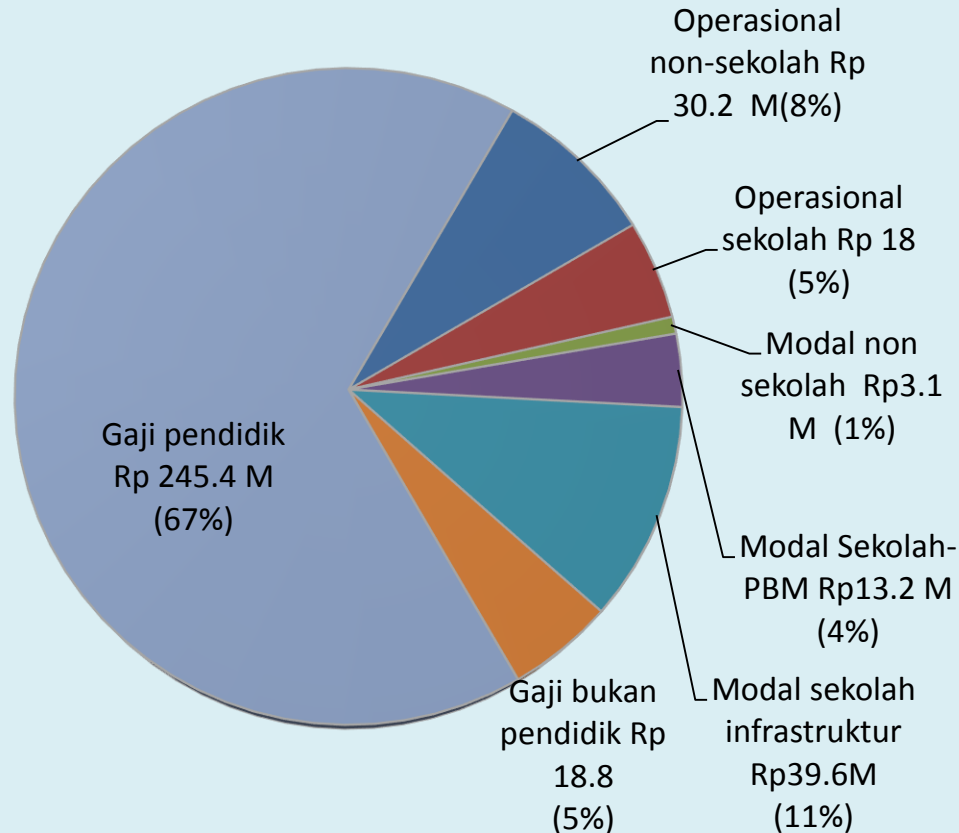
Sumber: Hasil Perhitungan Biaya Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Kota Surakarta, 2010

Hasil perhitungan BOSP untuk SMP/MTS dengan menggunakan indeks Permendiknas adalah sebesar Rp 649,000 per siswa. Pemerintah pusat melalui alokasi BOS menyediakan sebesar Rp 575.000 per siswa. Sisanya sebesar Rp. 74,000 per siswa harus disediakan oleh pemerintah daerah. Jika Pemerintah Provinsi mengalokasikan Rp. 50.000 per siswa, maka pemerintah kota harus menyediakan Rp. 24,000 per siswa.

ANALISIS PERBANDINGAN PROPORSI BELANJA OPERASIONAL SEKOLAH

Contoh Kasus

Perbandingan Proporsi Belanja Operasional Sekolah Kota Surakarta



Belanja operasional gaji pendidik mengambil porsi terbesar dalam belanja sektor pendidikan, sehingga alokasi belanja modal sekolah dan belanja operasional non-gaji menjadi terbatas. Belanja modal sekolah untuk infrastruktur masih relatif kecil mengakibatkan terbatasnya upaya perbaikan infrastruktur sekolah.

ANALISIS SUMBER DAYA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Contoh Kasus

Rasio Siswa/ Guru dan Rasio Rombel/Guru tingkat SD/MI Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2009/2010

| Kabupaten | Jumlah Siswa | Jumlah Rombel | Jumlah Guru | Rasio Siswa / Guru | Rasio Rombel / Guru |
|----------------------|--------------|---------------|-------------|--------------------|---------------------|
| KEPULAUAN MENTAWAI | 12.311 | 691 | 505 | 24,38 | 0,73 |
| PESISIR SELATAN | 61.593 | 2.007 | 3.820 | 16,12 | 1,90 |
| SOLOK | 50.754 | 2.275 | 3.739 | 13,57 | 1,64 |
| SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG | 53.406 | 1.306 | 1.872 | 28,53 | 1,43 |
| TANAH DATAR | 43.094 | 1.962 | 2.965 | 14,53 | 1,51 |
| PADANG PARIAMAN | 61.520 | 2.691 | 3.653 | 16,84 | 1,36 |
| AGAM | 50.657 | 2.658 | 3.904 | 12,98 | 1,47 |
| LIMA PULUH KOTO | 45.536 | 2.362 | 3.577 | 12,73 | 1,51 |
| PASAMAN | 38.921 | 1.636 | 2.271 | 17,14 | 1,39 |
| SOLOK SELATAN | 21.166 | 959 | 1.706 | 12,41 | 1,78 |
| DHARMASRAYA | 24.274 | 1.066 | 1.726 | 14,06 | 1,62 |
| PASAMAN BARAT | 53.423 | 2.033 | 3.742 | 14,28 | 1,84 |
| KOTA PADANG | 97.211 | 3.126 | 5.713 | 17,02 | 1,83 |
| KOTA SOLOK | 7.210 | 291 | 600 | 12,02 | 2,06 |

| Kabupaten | Jumlah Siswa | Jumlah Rombel | Jumlah Guru | Rasio Siswa / Guru | Rasio Rombel / Guru |
|-----------------------|----------------|---------------|---------------|--------------------|---------------------|
| KOTA PADANG PANJANG | 6.123 | 219 | 807 | 7,59 | 3,68 |
| KOTA BUKITTINGGI | 14.331 | 600 | 849 | 16,88 | 1,42 |
| KOTA PAYAKUMBUH | 14.932 | 529 | 904 | 16,52 | 1,71 |
| KOTA PARIAMAN | 11.037 | 440 | 471 | 23,43 | 1,07 |
| SUMATERA BARAT | 674.306 | 27.203 | 43.516 | 15,50 | 2,07 |

Rasio siswa/ guru di Provinsi Sumatera Barat rata-rata adalah 15 orang siswa/guru, lebih rendah dari Standar Nasional Pendidikan sebesar 28 orang siswa/guru maupun Standar Pelayanan Minimum Pendidikan sebesar 32 siswa/guru. Rendahnya rasio siswa/guru menunjukkan adanya kelebihan jumlah guru di Provinsi Sumatera Barat. Rata-rata rasio rombel/guru di Sumatera Barat adalah 2,07. Sementara itu, rasio ideal rombel/guru adalah 1. Tingginya rasio rombel/guru menunjukkan adanya kelebihan guru.

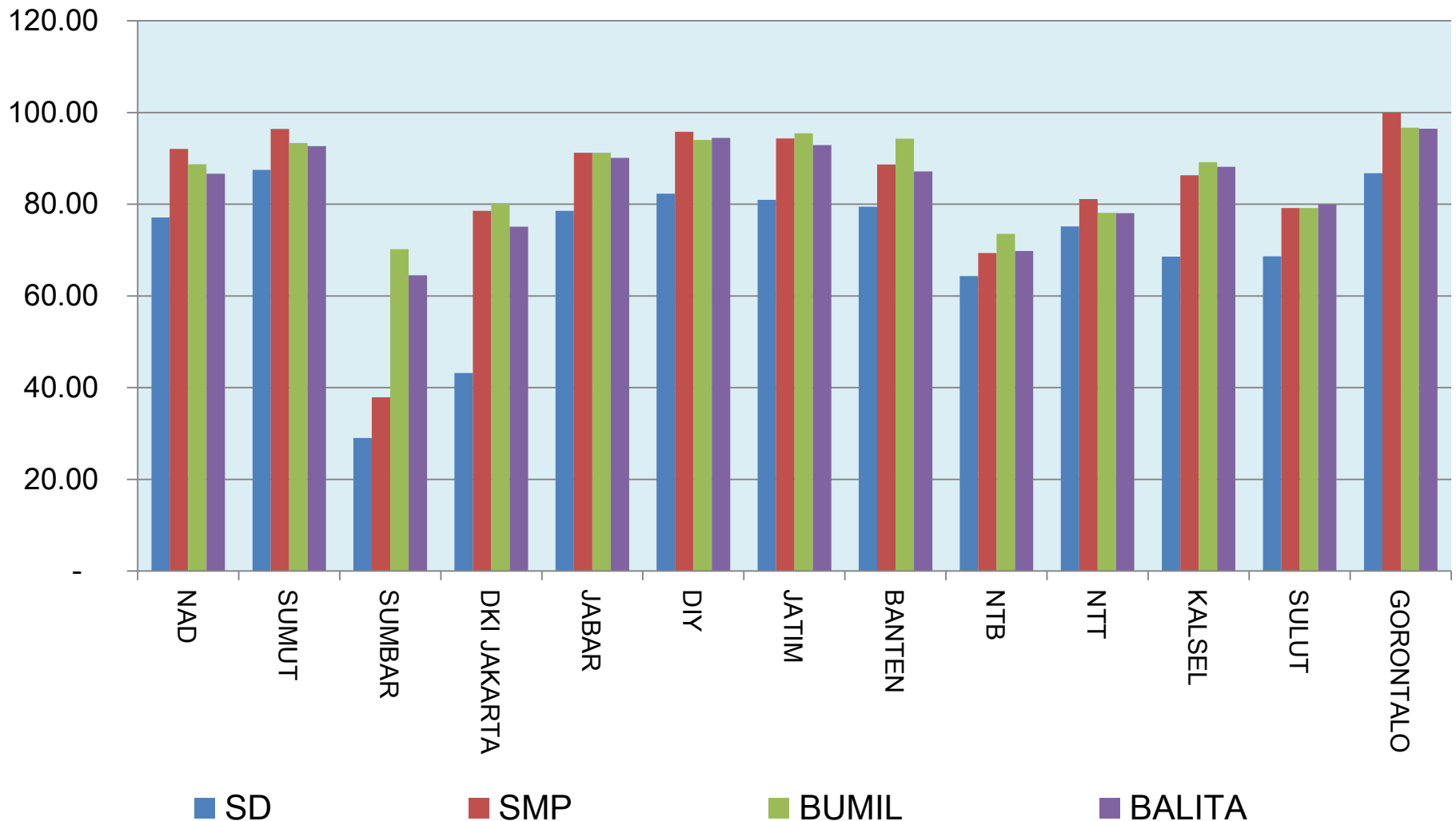
KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PROGRAM-PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN NASIONAL DAN SASARANNYA

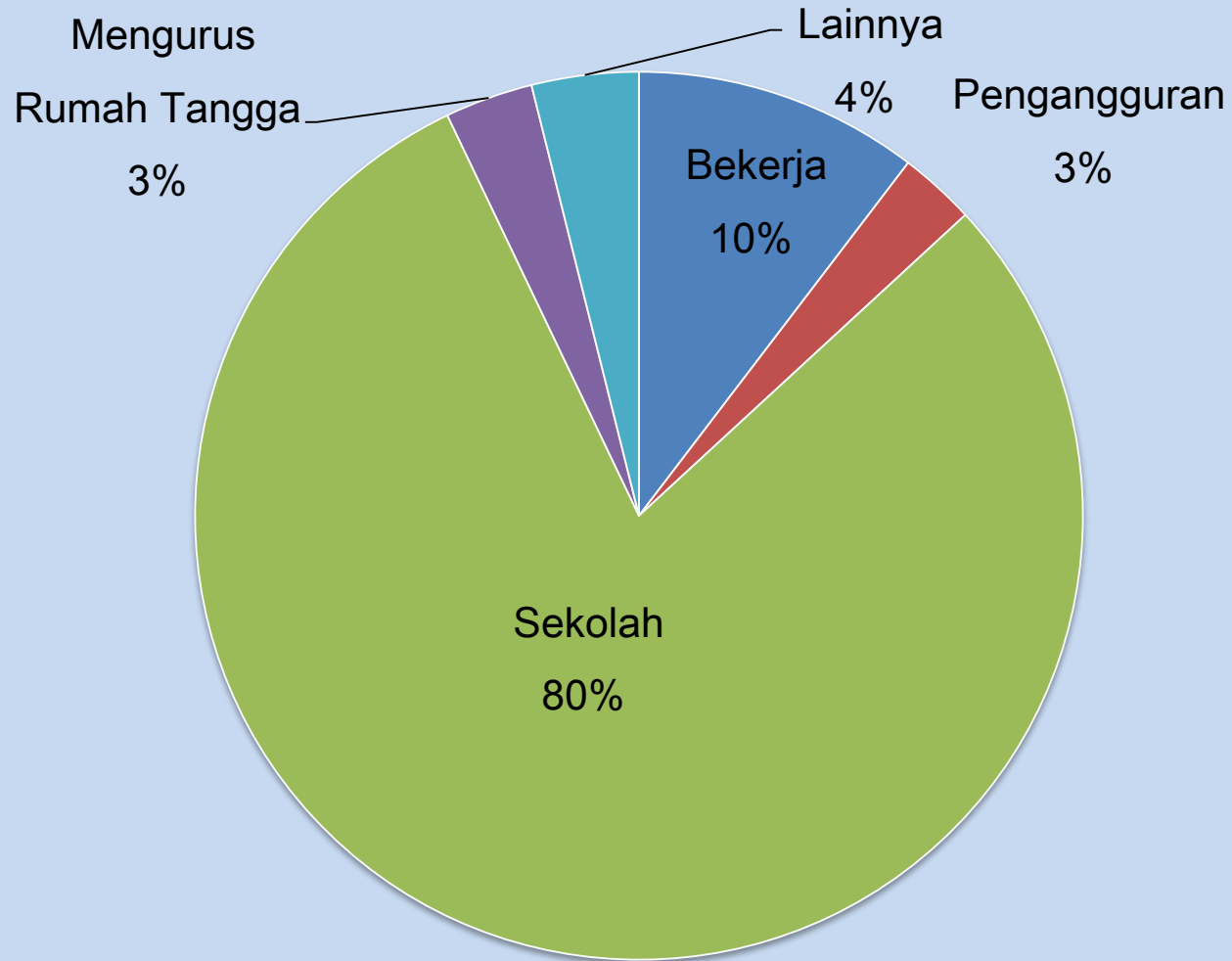
| No | Program | Sasaran |
|----|---|---|
| 1 | Program Keluarga Harapan (PKH) | Rumah Tangga Miskin dan Sangat Miskin |
| 2 | Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) | Rumah Tangga Hampir Miskin, Miskin dan Sangat Miskin |
| 3 | Program Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) | Rumah Tangga Miskin dan Sangat Miskin |
| 4 | Program Beasiswa Pendidikan untuk Keluarga Miskin | Siswa dari Rumah Tangga Miskin dan Sangat Miskin |
| | a. Sekolah Dasar (SD/MI) | Siswa SD dari Rumah Tangga Miskin dan Sangat Miskin |
| | a. Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs) | Siswa SMP/MTs dari Rumah Tangga Miskin dan Sangat Miskin |
| | a. Sekolah menengah Atas (SMA/MA/SMK) | Siswa SMA/MA/SMK dari Rumah Tangga Miskin dan Sangat Miskin |
| | a. Pendidikan Tinggi (Diploma dan Sarjana) | Mahasiswa dari Rumah Tangga Miskin dan Sangat Miskin |

| No | Program | Sasaran |
|----|--|---|
| 5 | Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri | Kelompok Masyarakat Umum |
| | a. PNPM Mandiri Perdesaan | Kelompok Masyarakat Perdesaan |
| | a. PNPM Mandiri Perkotaan | Kelompok Masyarakat Perkotaan |
| | a. PNPM Daerah Tertinggal dan Khusus | Kelompok Masyarakat Pedalaman, Tertinggal dan Khusus (Bencana, Konflik dll) |
| | a. PNPM Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) | Kelompok Masyarakat Perdesaan |
| | a. PNPM Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Wilayah (PISEW) | Kelompok Masyarakat Perdesaan |
| | a. PNPM Peningkatan Usaha Agrobisnis Pertanian (PUAP) | Kelompok Masyarakat Pertanian Perdesaan |
| | a. PNPM Kelautan dan Perikanan (KP) | Kelompok Masyarakat Pesisir dan Pelaut |
| | a. PNPM Pariwisata | Kelompok Masyarakat Perdesaan Potensial |
| | a. PNPM Generasi | Kelompok Masyarakat Perdesaan |
| | a. PNPM Green <i>Kecamatan Development Program</i> (G-KDP) | Kelompok Masyarakat Perdesaan |
| | a. PNPM Neighbourhood Development (ND) | Kelompok Masyarakat Perkotaan |
| 6 | Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) | Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah |

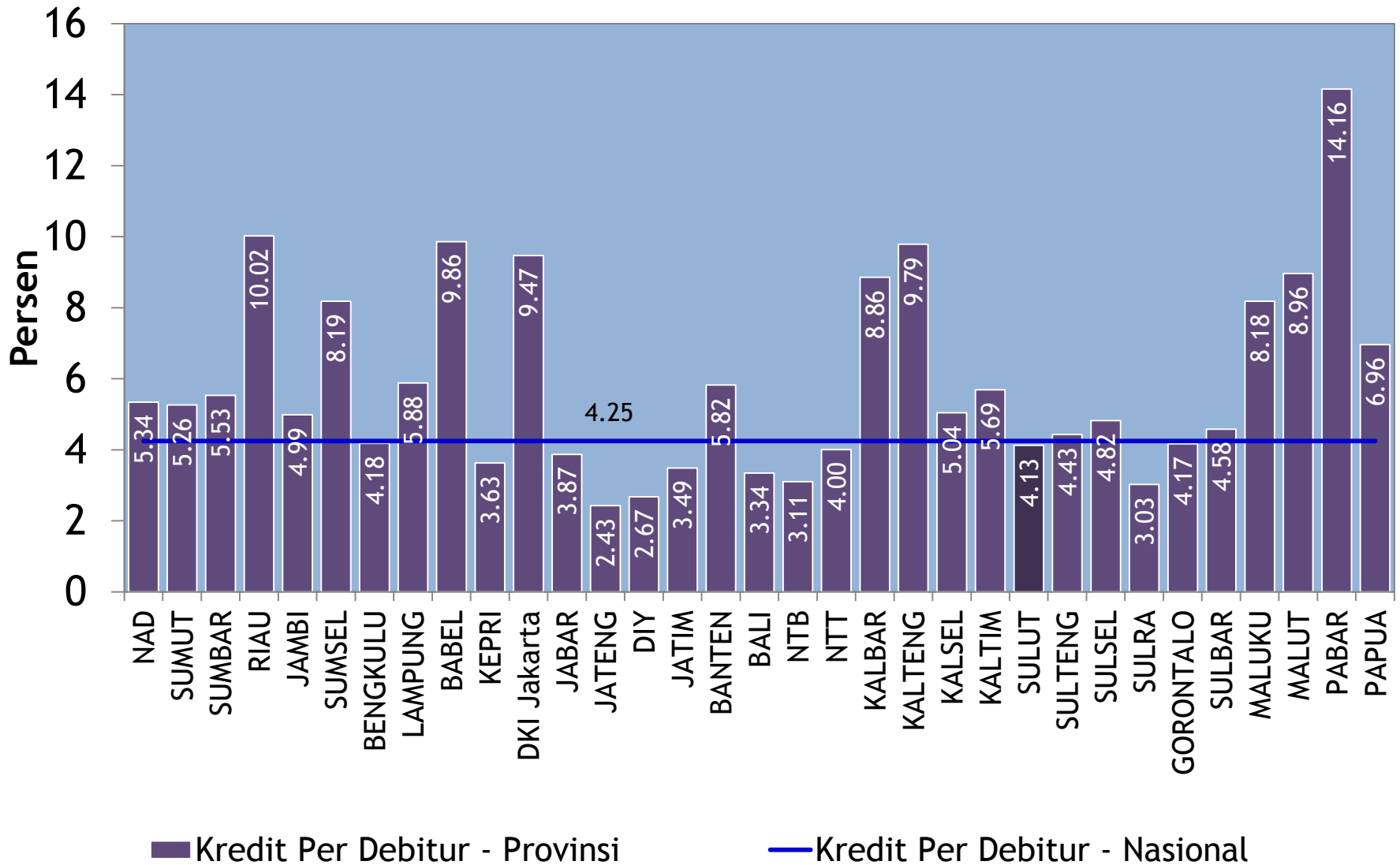
Perbandingan Pencapaian Proses Verifikasi Program Keluarga Harapan (PKH) Menurut Provinsi, Tahun 2010



Persentase Anak Berumur 10-17 Tahun Menurut Jenis Kegiatan, 2009



Jumlah Kredit Per-Debitur Menurut Provinsi (Desember 2010)



TERIMA KASIH

